



**PEMBERIAN DUKUNGAN BADAN KEAHLIAN
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**Johnson K Rajagukguk, SH, MH
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)**

LANDASAN HUKUM DUKUNGAN KEAHLIAN DPR RI

- ▶ **Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.**
- ▶ **Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI.**
- ▶ **Peraturan Pimpinan DPR RI No.1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI.**
- ▶ **Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.2 Tahun 2016.**

STRUKTUR KELEMBAGAAN BKD

BADAN KEAHLIAN DPR

```
graph TD; BKD[BADAN KEAHLIAN DPR] --> PU[Pusat Perancangan Undang-Undang]; BKD --> PMP[Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU]; BKD --> PKA[Pusat Kajian Anggaran]; BKD --> PKAKN[Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara]; BKD --> PP[Pusat Penelitian];
```

**Pusat
Perancangan
Undang-
Undang**

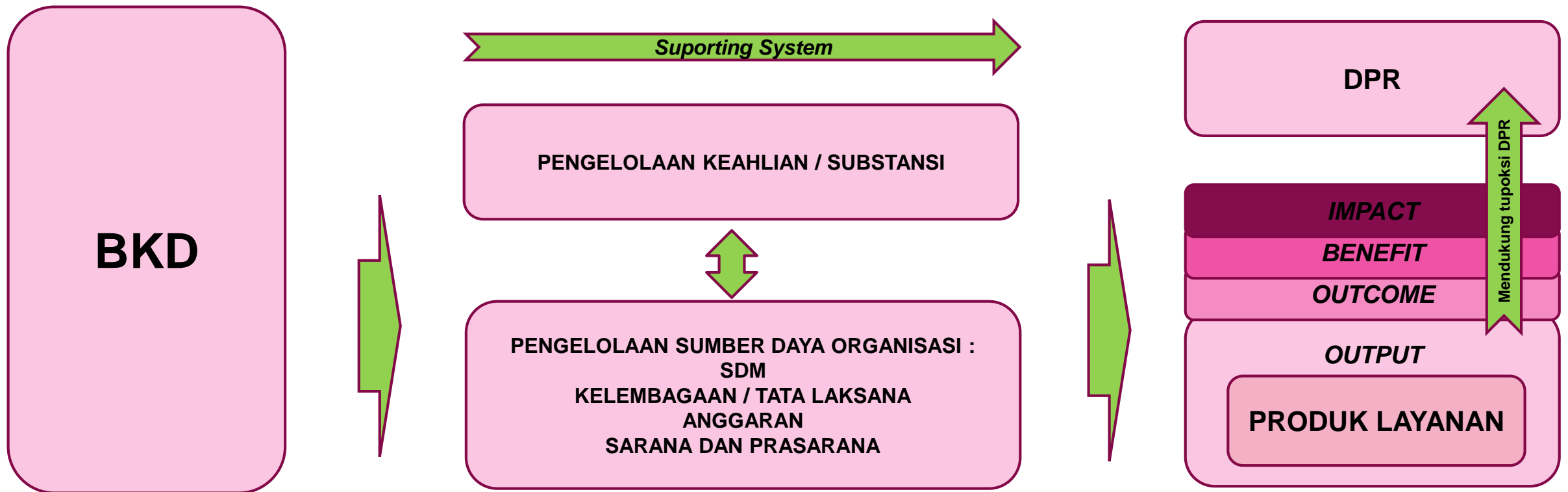
**Pusat
Pemantauan
Pelaksanaan
UU**

**Pusat Kajian
Anggaran**

**Pusat Kajian
Akuntabilitas
Keuangan
Negara**

**Pusat
Penelitian**

PENGELOLAAN BKD





TATA KELOLA SUBSTANSI

FORMAT DUKUNGAN

ASPEK-ASPEK FORMAT DUKUNGAN IDEAL BKD

➔ **Sifat Layanan: Imparsial, Teknokrat, Akademis dan Substantif**

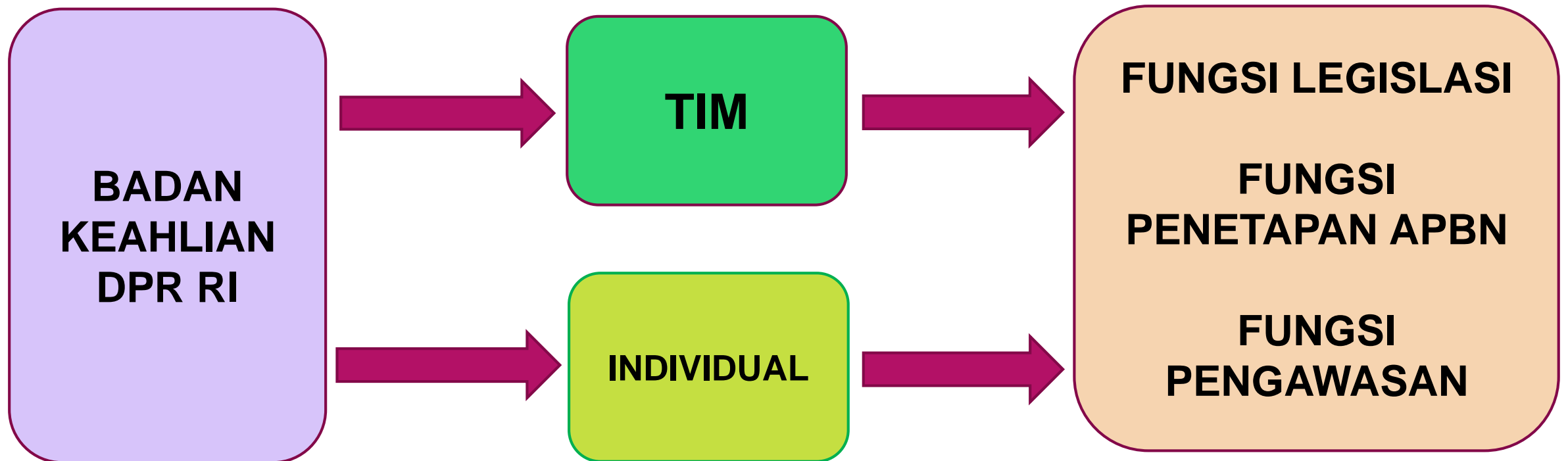
➔ **Produk Layanan: Sesuai Kebutuhan DPR**

➔ **Penyajian: Ringkas dan Mudah Dipahami**

➔ **Waktu penyajian: Cepat, Sesuai Permintaan dan Periodik**

➔ **SDM : Jumlah, Kualifikasi dan Spesialisasi**

MODEL PEMBERIAN DUKUNGAN



PRODUK UTAMA DUKUNGAN BKD

No	Dukungan Perancangan UU	Dukungan Pemantauan UU	Dukungan Kajian Anggaran	Dukungan Akuntabilitas Keuangan Negara	Dukungan Penelitian
1	Penyusunan Naskah Prolegnas	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan UU	Kajian terhadap RKP	Kajian terhadap Hasipem LKPP	Penelitian
2	Penyusunan Naskah Evaluasi Prolegnas	Penyusunan Laporam Peraturan Pelaksanaan UU	Kajian terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal	Kajian terhadap Haspem Keuangan	Jurnal Ilmiah
3	Panyusunan Naskah Akademik RUU	Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i>	Kajian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga	Kajian terhadap Haspem Kinerja	Penerbitan Buku
4	Penyusunan Naskah RUU	Pendampingan Tim Kuasa DPR	Kajian terhadap RUU APBN	Kajian terhadap Haspem Semester	Kajian/Info Singkat
5	Pendampingan Pembahasan RUU		Kajian terhadap Pertimbangan Tertulis DPD Atas RUU APBN	Kajian terhadap Pertimbangan Tertulis DPD atas Hapsem	Kajian Khusus
6	Kajian RUU Pemerintah/DPR		Kajian terhadap RUU Perubahan APBN		Diskusi/Workshop
7	<i>Quick Response</i> sesuai kebutuhan Pansus		Kajian terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN		
8			Penerbitan Jurnal, Buku dan Bbuletin APBN		

PENGELOLAAN PRODUK BKD

▶ Dasar Penyusunan Produk:

- ❖ Siklus/Agenda pelaksanaan fungsi Dewan (Bersifat Aktif).
- ❖ Permintaan (Bersifat Pasif).
- ❖ Penguatan kelembagaan.

▶ Sistem Kerja:

- ❖ Produk dukungan BKD disusun secara Tim (Pusat/Antar Pusat) dan individual
- ❖ Pelibatan Pakar (termasuk profesional seperti Pengacara) dengan sistem kontrak, Tenaga Ahli AKD dan Pegawai Parlemen

▶ Penyajian Produk:

- ❖ Tertulis baik dalam bentuk laporan dan penerbitan.
- ❖ Tidak tertulis dalam bentuk konsultatif dan pendampingan



TATA KELOLA SUMBER DAYA ORGANISASI

SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sumber Daya	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal	Kekurangan	Keterangan
1	Perancang	48	50-60	2-10	Mengatur sistem kerja melalui pembentukan Tim yang beranggotakan pegawai Antar Pusat.
2	Analisis Hukum	0	30-40	30-40	
3	Analisis APBN (PKA)	15	50-60	35-45	
4	Analisis APBN (PAKN)	2	30-40	28-38	
5	Peneliti	73	150	77	

Arah Kebijakan dan Strategi Pokok SDM Kedepan

- ▶ **Pembentukan pegawai tetap dan tidak tetap.**
 - ❖ Pegawai tetap berfungsi sebagai pemberian dukungan dan menjaga kelangsungan dan keberlanjutan Data, Informasi dan Pengetahuan (Penerapan *knowledge management*).
 - ❖ Pegawai tidak tetap berfungsi mendukung beban penyelenggaraan dukungan keahlian.
- ▶ **Pola pengisian SDM:**
 - ❖ Untuk pegawai tetap dilakukan melalui penerimaan CPNS/mutasi internal dan eksternal.
 - ❖ Untuk pegawai tidak tetap melalui pengisian formasi PPPK dan alternatif integrasi TA AKD ke BKD.

KELEMBAGAAN

- ▶ Pedoman dan SOP terkait dengan pemberian dukungan keahlian sudah ada tapi perlu penyesuaian.

Arah Kebijakan dan Strategi Pokok:

- ▶ Pembentukan bidang yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Keahlian (Disetarakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III).
- ▶ Melakukan *strategic partnership* (Pelibatan dalam Pembentukan Tim Kerja) dengan berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya.
- ▶ Evaluasi dan penyusunan berbagai pedoman/SOP.
- ▶ Pengaturan lebih lanjut mengenai Hubungan Setjen dengan BK terkait dengan administrasi.
- ▶ Pengangkatan Analis APBN dan penyusunan berbagai Instrumen Pembinaan Jabatan Fungsional Analis APBN.
- ▶ Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Jabatan Fungsional Lain yang berlaku di DPR (Instansi Pembina).

ANGGARAN

- ▶ Anggaran sudah ada dalam Anggaran Satker Setjen melalui Program Peningkatan Dukungan Keahlian.

Arah Kebijakan dan Strategi Pokok Kedepan:

- ▶ Pembentukan Satuan Kerja Badan Keahlian Dewan (saat ini masih di Satker Setjen).

SARANA DAN PRASARANA

- ▶ Saat ini lokasi pusat masih terpisah.

Arah Kebijakan dan Strategi Pokok Kedepan:

- ▶ Penempatan lokasi pusat-pusat dalam satu area agar memudahkan koordinasi.
- ▶ Penataan *Web* BKD.
- ▶ Konsolidasi dan pengembangan *database*.



TERIMA KASIH